

PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA, MALAYSIA, DAN INDIA

Oleh:

Fadila Ramadona Wijaya¹

Andi Nugraha²

Candy Khairani³

Irfan Fauzi⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam “UISU” Pematangsiantar

Alamat: JL. Sangnawaluh Km. 4, 5, Pahlawan, Kec. Siantar Tim., Kota Pematang

Siantar, Sumatera Utara (21136).

Korespondensi Penulis: fadilaramadonaw@gmail.com, a67747073@gmail.com,
candykhairani@gmail.com, irfan17fauzi17@gmail.com

Abstract. *This study presents a descriptive comparative analysis of the education systems in three Asian countries: Indonesia, Malaysia, and India. Despite their differing historical, cultural, and socioeconomic contexts, all three share a unified vision of utilizing education as a strategic tool for national development and human capital improvement. The research explores educational structures, key policies, challenges, and achievements at primary, secondary, and tertiary levels. Through a thematic analytical approach, the study highlights Indonesia’s decentralization and implementation of the Merdeka Curriculum, Malaysia’s emphasis on social cohesion and internationalization through the Malaysia Education Blueprint (PPPM), and India’s innovative reforms under the National Education Policy (NEP) 2020, which promote flexibility and digitalization. Findings reveal shared efforts to enhance accessibility and quality of education, alongside significant differences in governance structures, language policies, and national challenges. The study offers valuable insights for policymakers, emphasizing the importance of contextualized reforms, teacher professionalization, and technology integration to strengthen educational quality in the twenty-first century.*

PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA, MALAYSIA, DAN INDIA

Keywords: *Comparative Education, Indonesia, Malaysia, India, Education Policy, National Development, Curriculum Reform.*

Abstrak. Penelitian ini merupakan studi komparatif deskriptif yang mengkaji secara mendalam sistem pendidikan di tiga negara Asia, yaitu Indonesia, Malaysia, dan India. Meskipun memiliki latar belakang sejarah, budaya, dan sosial-ekonomi yang berbeda, ketiganya menunjukkan komitmen yang sama dalam menjadikan pendidikan sebagai instrumen strategis untuk pembangunan nasional dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kajian ini menelusuri struktur pendidikan, kebijakan utama, tantangan, dan capaian pada tingkat dasar, menengah, serta tinggi. Analisis tematik yang digunakan mengungkapkan bahwa Indonesia menonjol dalam desentralisasi pendidikan dan implementasi Kurikulum Merdeka, Malaysia berfokus pada kohesi sosial dan internasionalisasi pendidikan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM), sementara India menunjukkan inovasi melalui National Education Policy (NEP) 2020 yang menekankan fleksibilitas dan digitalisasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesamaan dalam upaya memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan, namun juga perbedaan mencolok terkait tata kelola, kebijakan bahasa, dan skala tantangan nasional. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi pengambil kebijakan tentang perlunya konteks lokal dalam reformasi pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta pemanfaatan teknologi untuk memperkuat kualitas pembelajaran di abad ke-21.

Kata Kunci: Pendidikan Komparatif, Indonesia, Malaysia, India, Kebijakan Pendidikan, Pembangunan Nasional, Reformasi Kurikulum.

LATAR BELAKANG

Indonesia, Malaysia, dan India merupakan tiga negara Asia yang memiliki kesamaan visi dalam menjadikan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan nasional, meskipun masing-masing memiliki latar belakang sejarah, sosial, dan politik yang berbeda. Indonesia dengan warisan kolonial Belanda, serta Malaysia dan India yang dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Inggris, menunjukkan pola evolusi kebijakan pendidikan yang unik namun saling beririsan dalam upaya modernisasi dan pemerataan pendidikan.

Pendidikan di ketiga negara tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai alat strategis untuk membentuk identitas nasional dan meningkatkan daya saing global. Indonesia menitikberatkan pada desentralisasi pendidikan dan pemerataan akses di wilayah kepulauan, Malaysia berfokus pada integrasi sosial dalam masyarakat multietnis serta internasionalisasi pendidikan, sedangkan India menekankan reformasi kurikulum dan digitalisasi melalui *National Education Policy* (NEP) 2020 guna menjawab tantangan populasi besar dan globalisasi.

Kajian ini menggunakan pendekatan pendidikan komparatif berdasarkan kerangka teori Bereday dan Noah & Eckstein¹, yang meliputi tahapan deskripsi, interpretasi, juxtaposisi, dan perbandingan. Pendekatan tersebut memungkinkan analisis yang tidak hanya menyoroti struktur dan kebijakan pendidikan, tetapi juga konteks sosial dan ideologis yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran kritis dan komprehensif mengenai perbedaan dan persamaan sistem pendidikan di ketiga negara, serta implikasinya terhadap pengembangan kebijakan pendidikan yang relevan di era global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif, dengan tujuan menggambarkan dan membandingkan sistem pendidikan di Indonesia, Malaysia, dan India secara sistematis dan ilmiah. Pendekatan ini mengacu pada model analisis komparatif pendidikan yang dikemukakan oleh George Z. F. Bereday (1964) dan Harold J. Noah & Max Eckstein (1969)², yang meliputi empat tahap utama: deskripsi, interpretasi, juxtaposisi (penyandingan), dan perbandingan. Model ini banyak digunakan dalam penelitian pendidikan lintas negara karena memberikan ruang bagi analisis yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kontekstual dan filosofis.

Data penelitian ini bersumber dari dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga internasional seperti UNESCO dan World Bank, jurnal akademik nasional, serta buku-buku ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan tentang sistem pendidikan ketiga negara. Analisis data dilakukan secara tematik-komparatif, dengan langkah-langkah: (1)

¹ Yahya AD, *Mengenal Ilmu Perbandingan Pendidikan*, (Lampung: Fakta Press, 2011), h. 32 – 33.

² Ibid.

PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA, MALAYSIA, DAN INDIA

mendeskripsikan konteks pendidikan nasional masing-masing negara, (2) mengidentifikasi kebijakan utama dan tantangan sistemik, (3) menyandingkan aspek-aspek perbandingan seperti struktur, kurikulum, tata kelola, dan pembiayaan, serta (4) menarik sintesis dan kesimpulan mengenai kesamaan dan perbedaan yang signifikan.

Studi perbandingan tidak hanya menelaah struktur pendidikan formal, tetapi juga menyoroti “nilai-nilai sosial, politik, dan ekonomi yang melandasi kebijakan pendidikan di setiap negara.” Oleh karena itu, penelitian ini tidak semata membahas bentuk sistem pendidikan, tetapi juga melihat bagaimana ideologi dan kebijakan publik membentuk arah reformasi pendidikan di ketiga negara³.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sistem Pendidikan Masing-Masing Negara

a. Pendidikan di Indonesia

Indonesia memiliki sistem pendidikan yang sangat besar dan terdesentralisasi, melayani lebih dari 50 juta siswa dan 3 juta guru. Sejak reformasi 1998, terjadi pergeseran signifikan dari sistem yang sangat terpusat ke desentralisasi, di mana pemerintah daerah memiliki peran lebih besar dalam pengelolaan pendidikan.

1. Struktur Pendidikan

- a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): Usia 0-6 tahun, tidak wajib, mencakup Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain.
- b) Pendidikan Dasar (Wajib Belajar 9 Tahun):
 - 1) Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI): 6 tahun, usia 7-12 tahun.
 - 2) Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs): 3 tahun, usia 13-15 tahun.
- c) Pendidikan Menengah (Wajib Belajar 12 Tahun, diperkenalkan):
 - 1) Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah (MA): 3 tahun, fokus umum.
 - 2) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK): 3 tahun, fokus kejuruan dan keterampilan.

³ Ahmad Qurtubi, *Perbandingan Pendidikan*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), h. 105.

- d) Pendidikan Tinggi: Meliputi universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi, baik negeri maupun swasta⁴.

2. Kebijakan Kunci:

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Menjadi landasan hukum utama.
- b) Wajib Belajar 12 Tahun: Diperkenalkan untuk meningkatkan partisipasi di tingkat menengah.
- c) Kurikulum Nasional: Saat ini menerapkan Kurikulum Merdeka yang menekankan fleksibilitas, personalisasi pembelajaran, dan pengembangan karakter. Sebelumnya, beberapa kali ganti kurikulum (KTSP, K13).
- d) Sertifikasi Guru dan Pengembangan Profesional: Program untuk meningkatkan kualitas guru.
- e) Anggaran Pendidikan: Dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD.

3. Tantangan:

- a) Pemerataan Akses dan Kualitas: Kesenjangan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara satuan pendidikan di Pulau Jawa dan luar Jawa, terutama dalam hal fasilitas, infrastruktur, dan kualitas guru.
- b) Kualitas Guru: Meskipun ada program sertifikasi, kualitas pembelajaran di kelas masih menjadi perhatian, terutama dalam hal pedagogi dan penguasaan materi.
- c) Relevansi Pendidikan dengan Kebutuhan Industri: Kesenjangan antara lulusan pendidikan kejuruan dan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja.

4. Pencapaian:

- a) Peningkatan Angka Partisipasi: Akses ke pendidikan dasar dan menengah telah meningkat secara signifikan.
- b) Keragaman Sistem: Menawarkan jalur pendidikan umum, kejuruan, dan keagamaan yang bervariasi.
- c) Investasi Anggaran: Komitmen anggaran yang besar menunjukkan prioritas pemerintah terhadap pendidikan.

⁴ Ibid, h. 107 – 109.

PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA, MALAYSIA, DAN INDIA

b. Pendidikan di Malaysia

Malaysia memiliki sistem pendidikan yang terpusat dan berupaya menyeimbangkan identitas nasional dengan kebutuhan masyarakat multietnisnya. Sejak kemerdekaannya, pendidikan telah menjadi instrumen penting untuk pembangunan bangsa dan kohesi sosial.

1. Struktur Pendidikan⁵:

- a) Pendidikan Prasekolah: Usia 4-6 tahun, tidak wajib namun sangat didorong.
- b) Pendidikan Rendah (Wajib Belajar 6 Tahun):
 - 1) Sekolah Kebangsaan (SK): 6 tahun, bahasa pengantar Melayu.
 - 2) Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina/Tamil: 6 tahun, bahasa pengantar Mandarin/Tamil.
- c) Pendidikan Menengah (5 Tahun):
 - 1) Menengah Rendah (Tingkatan 1-3): 3 tahun.
 - 2) Menengah Atas (Tingkatan 4-5): 2 tahun, dengan pilihan jalur seni, sains, atau teknik.
 - 3) Pendidikan pasca-menengah (Pra-Universiti): Tingkatan 6 atau Matrikulasi (setara SMA).
- d) Pendidikan Tinggi: Meliputi universitas negeri dan swasta, politeknik, dan kolej komunitas.

2. Kebijakan Kunci:

- a) Dasar Pendidikan Kebangsaan: Menekankan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama untuk membentuk identitas nasional, namun mengakui keberadaan sekolah kebangsaan jenis Cina dan Tamil.
- b) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013- 2025: Cetak biru ambisius untuk mentransformasi sistem pendidikan dengan fokus pada akses, kualitas, kesetaraan, efisiensi, dan pengembangan nilai-nilai.
- c) Pendidikan Teknik dan Latihan Vokasional (TVET): Prioritas tinggi untuk memenuhi kebutuhan industri.

⁵ Abdurrahmansyah, *Perbandingan Pendidikan Islam (Isu-isu Kontemporer Tentang Konsep, Kebijakan dan Implementasi)*, (Palembang: CV. Penerbit Anugrah Jaya, 2021), h. 155 – 157.

- d) Internasionalisasi Pendidikan Tinggi: Dorongan untuk menarik mahasiswa internasional dan meningkatkan peringkat universitas global.

3. Tantangan:

- a) Kualitas Guru: Kebutuhan untuk terus meningkatkan kualitas guru, terutama dalam pedagogi inovatif dan penguasaan teknologi.
- b) Relevansi Kurikulum: Memastikan kurikulum tetap relevan dengan tuntutan abad ke-21 dan pasar kerja yang berubah.
- c) Perdebatan Bahasa Pengantar: Konflik sesekali tentang peran bahasa Melayu dan Inggris di sekolah.

4. Pencapaian:

- a) Tingkat Literasi Tinggi: Tingkat melek huruf yang sangat tinggi di kalangan penduduk.
- b) Infrastruktur Pendidikan yang Baik: Investasi signifikan dalam fasilitas fisik sekolah.
- c) Sistem Pendidikan Tinggi yang Kuat: Beberapa universitas Malaysia telah mencapai reputasi internasional yang baik.

c. Pendidikan di India

India memiliki salah satu sistem pendidikan terbesar di dunia, dengan keragaman yang luar biasa dalam hal penyediaan, kualitas, dan tantangan. Sejak kemerdekaan, India telah berupaya keras untuk memberikan pendidikan universal di tengah populasi yang masif dan struktur sosial yang kompleks.

1. Struktur Pendidikan:

- a) Pendidikan Prasekolah: Usia 3-6 tahun, tidak wajib, seringkali melalui Anganwadi atau sekolah swasta.
- b) Pendidikan Dasar (Wajib Belajar 8 Tahun): Berdasarkan *Right to Education (RTE) Act 2009*.
 - 1) *Primary Education* (Kelas 1-5): Usia 6-11 tahun.
 - 2) *Middle Education* (Kelas 6-8): Usia 11-14 tahun.
- c) Pendidikan Menengah (Wajib Belajar 12 Tahun, melalui RTE):
 - 1) *Secondary Education* (Kelas 9-10): Usia 14-16 tahun.
 - 2) *Higher Secondary* (Kelas 11-12): Usia 16-18 tahun.

PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA, MALAYSIA, DAN INDIA

- d) Pendidikan Tinggi: Sangat beragam, termasuk universitas negeri (federal dan negara bagian) dan swasta, institut teknologi (IITs), institut manajemen (IIMs), dan berbagai lembaga kejuruan dan profesional lainnya.

2. Kebijakan Kunci:

- a) *Right to Education (RTE) Act 2009*: Menjamin pendidikan dasar gratis dan wajib bagi semua anak usia 6-14 tahun.
- b) *National Education Policy (NEP) 2020*: Kebijakan komprehensif yang bertujuan mereformasi seluruh spektrum pendidikan, mulai dari prasekolah hingga pendidikan tinggi. Menitikberatkan pada fleksibilitas, pembelajaran multidisipliner, digitalisasi, dan peningkatan kualitas.
- c) *Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)*: Program unggulan untuk universalisasi pendidikan dasar.
- d) *Rasam Shiksha Abhiyan (RMSA)*: Fokus pada universalisasi pendidikan menengah.
- e) Digital India: Inisiatif untuk memanfaatkan teknologi dalam pendidikan, termasuk platform pembelajaran online.

3. Tantangan:

- a) Skala dan Kualitas: Memastikan kualitas pendidikan yang seragam di seluruh negara dengan populasi yang sangat besar dan beragam.
- b) Kesenjangan Akses: Meskipun RTE, akses bagi anak-anak di daerah terpencil, dari kasta yang lebih rendah (Dalit), suku (Adivasi), dan perempuan masih menjadi tantangan.
- c) Kualitas Guru dan Pelatihan: Ketersediaan guru yang berkualitas dan pelatihan yang memadai, terutama di sekolah-sekolah pedesaan.
- d) Anggaran dan Infrastruktur: Investasi yang memadai dalam infrastruktur fisik dan sumber daya di sekolah-sekolah publik.
- e) Lulusan yang Tidak Memiliki Pekerjaan: Kesenjangan keterampilan antara lulusan pendidikan tinggi dan kebutuhan pasar kerja.

4. Pencapaian:

- a) Peningkatan Angka Pendaftaran: Peningkatan drastis dalam pendaftaran siswa di semua tingkat pendidikan berkat RTE dan program lainnya.
- b) Institusi Unggulan Global: Keberadaan institusi pendidikan tinggi kelas dunia seperti IITs dan IIMs.
- c) Fokus pada STEM: India telah menjadi kekuatan global dalam ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika.
- d) Inisiatif Digital: Upaya signifikan dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran⁶.

Analisis Komparatif Tematik

1. Aksesibilitas dan Kesetaraan

Ketiga negara telah membuat kemajuan besar dalam meningkatkan akses ke pendidikan, terutama di tingkat dasar. Indonesia dan India telah menetapkan wajib belajar 12 dan 8 tahun (usia 6-14 tahun di India), didukung oleh kebijakan seperti RTE Act di India dan komitmen anggaran 20% di Indonesia. Malaysia, melalui PPPM, juga berupaya mencapai akses universal. Namun, tantangan kesetaraan tetap ada.

- a. Indonesia: Kesenjangan signifikan antara perkotaan dan pedesaan, serta antara pulau-pulau besar dan kecil. Anak-anak di daerah terpencil seringkali menghadapi fasilitas yang kurang memadai dan guru yang tidak berkualifikasi.
- b. Malaysia: Meskipun memiliki sistem sekolah kebangsaan, SJK (Cina/Tamil) tetap ada, yang kadang-kadang menimbulkan perdebatan mengenai segregasi dan kesetaraan kesempatan bagi semua etnis. Daerah pedesaan juga masih tertinggal dibandingkan perkotaan.
- c. India: Skala masalah kesetaraan sangat besar. Kasta, status sosial-ekonomi, gender, dan lokasi geografis masih menjadi faktor penentu utama dalam akses dan kualitas pendidikan yang diterima anak. RTE Act telah meningkatkan akses, tetapi kualitas pengalaman belajar di sekolah-

⁶ Anita Indria & Charles, *Perbandingan Pendidikan Islam*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2025), h. 85 – 101.

PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA, MALAYSIA, DAN INDIA

sekolah pemerintah yang dilayani dengan buruk masih menjadi perhatian.

2. Kualitas Pendidikan

- a. Kualitas Guru: Semua negara mengakui pentingnya guru berkualitas. Indonesia memiliki program sertifikasi guru, tetapi implementasinya belum sepenuhnya mengatasi masalah kualitas di lapangan. Malaysia memiliki standar yang relatif tinggi untuk perekrutan guru, namun terus berinvestasi dalam pengembangan profesional. India menghadapi tantangan masif dalam melatih dan memotivasi jutaan guru, terutama di sekolah-sekolah umum pedesaan.
- b. Kurikulum: Setiap negara telah melalui beberapa reformasi kurikulum. Indonesia dengan Kurikulum Merdeka yang menekankan fleksibilitas siswa, Malaysia dengan PPPM yang menekankan keterampilan abad ke-21, dan India dengan NEP 2020 yang ambisius untuk pembelajaran multidisipliner dan kritik. Tantangannya adalah implementasi yang efektif di kelas, melatih guru untuk kurikulum baru, dan memastikan relevansi dengan kebutuhan masa depan⁷.
- c. Hasil Belajar: Performa dalam penilaian internasional (seperti PISA atau TIMSS) menunjukkan bahwa ketiga negara masih tertinggal dari rata-rata OECD, meskipun ada area perbaikan. Ini mengindikasikan bahwa sementara akses telah meningkat, kualitas hasil belajar masih memerlukan upaya signifikan.

3. Tata Kelola dan Pendanaan

- a. Indonesia: Sistem yang terdesentralisasi pasca-reformasi, dengan pemerintah daerah memiliki peran besar dalam pengelolaan pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah pusat menetapkan standar dan kurikulum nasional. Tantangannya adalah koordinasi dan kapasitas pemerintah daerah.

⁷ Agustinus Tangu Daga, "Perbandingan Pendidikan Karakter dalam Kurikulum Sekolah Dasar di Malaysia, India, dan Indonesia", *Jurnal Edukasi Sumba (JES)*, Vol. 4 No. 1 (2020), 63.

- b. Malaysia: Sistem yang lebih terpusat, dengan Kementerian Pendidikan memainkan peran dominan dalam perumusan kebijakan, kurikulum, dan alokasi sumber daya⁸.
- c. India: Sistem federal, di mana pendidikan adalah tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan negara bagian. Implementasi kebijakan nasional seringkali disesuaikan oleh masing-masing negara bagian, yang menyebabkan perbedaan signifikan di seluruh negeri.

Di sisi pendanaan, Indonesia memiliki komitmen konstitusional 20% dari APBN/APBD untuk pendidikan, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Malaysia juga mengalokasikan porsi signifikan dari anggaran negara untuk pendidikan. India, meskipun telah meningkatkan anggarannya, masih menghadapi defisit pendanaan yang besar mengingat skala populasinya. Ketiga negara juga menyaksikan pertumbuhan sektor pendidikan swasta, yang seringkali mengisi kesenjangan yang ditinggalkan oleh pendidikan publik, namun juga menghadirkan kekhawatiran tentang kesetaraan akses dan kualitas.

4. Kurikulum dan Bahasa Pengantar

- a. Indonesia: Bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar utama di semua tingkatan pendidikan, mendukung integrasi nasional di negara yang multietnis.
- b. Malaysia: Bahasa Melayu adalah bahasa pengantar utama di sekolah kebangsaan, tetapi sekolah jenis kebangsaan (Cina dan Tamil) menggunakan bahasa ibu mereka sebagai pengantar, mencerminkan kompromi politik dan budaya. Bahasa Inggris diajarkan sebagai mata pelajaran wajib dan sering digunakan di pendidikan tinggi.

⁸ Mutiara Rajagukguk, LR Retno Susanti, Erna Retna Safitri & Fakhili Gulo, "Analisis Sistem Pendidikan: Perbandingan Sistem Pendidikan di Indonesia dan Malaysia", *DE JOURNAL (Dharmas Education Journal)*, Vol. 5 No. 2 (2024), 20.

PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA, MALAYSIA, DAN INDIA

- c. India: Sangat kompleks. Bahasa Hindi adalah bahasa resmi federal, tetapi ada 22 bahasa resmi negara bagian lainnya. Bahasa Inggris sering digunakan di pendidikan tinggi dan sekolah swasta, sementara bahasa pengantar di tingkat dasar dan menengah seringkali adalah bahasa daerah atau negara bagian. Kebijakan NEP 2020 mendorong pendidikan multibahasa sejak dini.

5. Pendidikan Tinggi dan Pelatihan Kejuruan

- a. Indonesia: Upaya untuk meningkatkan kualitas riset dan internasionalisasi, namun masih bergulat dengan masalah relevansi dan kualitas lulusan di banyak institusi. Pendidikan vokasi sedang didorong kuat melalui revitalisasi SMK dan politeknik.
- b. Malaysia: Bertekad menjadi pusat keunggulan pendidikan tinggi regional, dengan beberapa universitas yang berperingkat baik secara global. Investasi besar dalam TVET untuk mengurangi kesenjangan keterampilan⁹.
- c. India: Memiliki jumlah mahasiswa perguruan tinggi terbesar kedua di dunia, dengan institusi riset kelas dunia seperti IITs, bersamaan dengan ribuan perguruan tinggi yang kualitasnya sangat bervariasi. NEP 2020 berupaya merestrukturisasi pendidikan tinggi untuk fokus pada fleksibilitas, multidisipliner, dan riset. Tantangan utama adalah menyediakan pendidikan berkualitas tinggi untuk skala yang masif dan mengatasi masalah pengangguran lulusan.

6. Peran Teknologi dalam Pendidikan

- a. Indonesia: Memanfaatkan platform pembelajaran daring seperti Rumah Belajar dan program guru penggerak daring. Tantangannya adalah infrastruktur internet yang belum merata.
- b. Malaysia: Mengintegrasikan TIK ke dalam kurikulum dan menggunakan platform *e-learning*¹⁰.

⁹ Karine Rizkita & Agung Supriyanto, "Komparasi kepemimpinan pendidikan di Indonesia dan Malaysia dalam upaya peningkatan mutu pendidikan", *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, Vol. 8 No. 2 (2020), 164.

¹⁰ Wilda Razaqna & Wiene Surya Putra, "Perbandingan Sistem Pendidikan di Malaysia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Generasi Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3 No. 1 (2024), 10.

- c. India: NEP 2020 mendorong penggunaan teknologi secara ekstensif, termasuk pendidikan daring, penggunaan AI dalam personalisasi pembelajaran, dan pengembangan platform digital. India memiliki ekosistem EdTech yang berkembang pesat¹¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian komparatif antara sistem pendidikan Indonesia, Malaysia, dan India, dapat disimpulkan bahwa ketiganya memiliki visi yang sama dalam menjadikan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan nasional dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, meskipun latar belakang sejarah, sosial, dan politik mereka berbeda. Indonesia menonjol dalam desentralisasi sistem pendidikan dan penerapan Kurikulum Merdeka yang menekankan kebebasan belajar serta penguatan karakter. Malaysia berfokus pada kohesi sosial dan internasionalisasi pendidikan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM), sedangkan India menampilkan reformasi progresif melalui *National Education Policy (NEP) 2020* yang menitikberatkan fleksibilitas, digitalisasi, dan pembelajaran multidisipliner.

Ketiga negara menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemerataan akses pendidikan, namun tetap menghadapi tantangan dalam hal kesetaraan kualitas, kompetensi guru, dan relevansi kurikulum terhadap kebutuhan industri global. Meskipun berbeda dalam tata kelola, Indonesia dengan sistem desentralisasi, Malaysia dengan pendekatan terpusat, dan India dengan model federal. Ketiganya sepakat bahwa profesionalisme guru dan pemanfaatan teknologi pendidikan merupakan kunci dalam memperkuat mutu pembelajaran abad ke-21. Dengan demikian, perbandingan ini menegaskan bahwa reformasi pendidikan yang efektif harus mempertimbangkan konteks sosial-budaya setiap negara, mengintegrasikan teknologi secara adaptif, dan menumbuhkan kolaborasi lintas sektor guna mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, dan kompetitif secara global.

Saran

¹¹ Agustinus Tanggu Daga, Op. Cit, 63.

PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA, MALAYSIA, DAN INDIA

Setiap negara diharapkan terus memperkuat kualitas pendidikan melalui sinergi antara kebijakan nasional, inovasi kurikulum, dan peningkatan profesionalisme guru secara berkelanjutan. Pemerintah perlu menempatkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang dengan memastikan pemerataan akses di seluruh wilayah, terutama daerah tertinggal dan terpencil. Selain itu, kolaborasi internasional dan pemanfaatan teknologi digital harus dioptimalkan untuk membangun sistem pembelajaran adaptif, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan global abad ke-21. Pendekatan pendidikan yang menekankan karakter, literasi digital, dan kompetensi abad modern menjadi kunci untuk menciptakan generasi yang unggul, berdaya saing, dan berintegritas tinggi.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahmansyah. (2021). *Perbandingan pendidikan Islam (Isu-isu kontemporer tentang konsep, kebijakan, dan implementasi)*. Palembang: CV Penerbit Anugrah Jaya.
- Daga, A. T. (2020). Perbandingan pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah dasar di Malaysia, India, dan Indonesia. *Jurnal Edukasi Sumba (JES)*, 4(1), 63.
- Qurtubi, A. (2020). *Perbandingan pendidikan*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Indria, A., & Charles. (2025). *Perbandingan pendidikan Islam*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Rizkita, K., & Supriyanto, A. (2020). Komparasi kepemimpinan pendidikan di Indonesia dan Malaysia dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 8(2), 164.
- Rajagukguk, M., Susanti, L. R. R., Safitri, E. R., & Gulo, F. (2024). Analisis sistem pendidikan: Perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dan Malaysia. *DE JOURNAL (Dharmas Education Journal)*, 5(2), 20.
- Razaqna, W., & Putra, W. S. (2024). Perbandingan sistem pendidikan di Malaysia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Generasi Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 10.
- Yahya, A. D. (2011). *Mengenal ilmu perbandingan pendidikan*. Lampung: Fakta Press.